

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2023

KEMENTERIAN  
KOORDINATOR  
BIDANG  
KEMARITIMAN  
DAN INVESTASI



**LAPORAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KEMENKO MARVES**

# KATA PENGANTAR

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Kemenko Marves pada tahun 2023 terus berinovasi untuk memberikan pelayanan kepada pemohon informasi secara akuntabel, transparan, mudah, cepat dan tanpa diskriminasi sesuai dengan amanat Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pada era digitalisasi seperti sekarang ini, setiap Badan Publik dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh informasi secara cepat, mudah dan berkualitas. Kemenko Marves terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan informasi agar mudah dijangkau oleh masyarakat melalui media sosial, youtube, email maupun website resmi Kemenko Marves

Komitmen Kemenko Marves dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tertuang melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 145 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan ditetapkannya 9 (Sembilan) Standar Pelayanan yang 6 (enam) diantaranya terpusat di PPID.

Laporan Layanan Informasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah selesai disusun atas sumbangsih seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota tim penyusun yang telah menyelesaikan Laporan Layanan Informasi Publik ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.

PPID Kementerian Koordinator  
Bidang Kemaritiman dan Investasi,

No.	Jabatan	Paraf
1.	Pranata Humas Ahli Muda	

Andreas Dipi Patria

# KATA PENGANTAR



Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Kemenko Marves pada tahun 2023 terus berinovasi untuk memberikan pelayanan kepada pemohon informasi secara akuntabel, transparan, mudah, cepat dan tanpa diskriminasi sesuai dengan amanat Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pada era digitalisasi seperti sekarang ini, setiap Badan Publik dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh informasi secara cepat, mudah dan berkualitas. Kemenko Marves terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan informasi agar mudah dijangkau oleh masyarakat melalui media sosial, youtube, email maupun website resmi Kemenko Marves

Komitmen Kemenko Marves dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tertuang melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 145 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan ditetapkannya 9 (Sembilan) Standar Pelayanan yang 6 (enam) diantaranya terpusat di PPID.

Laporan Layanan Informasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah selesai disusun atas sumbangsih seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota tim penyusun yang telah menyelesaikan Laporan Layanan Informasi Publik ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.

PPID Kementerian Koordinator  
Bidang Kemaritiman dan Investasi,

Andreas Dipi Patria

# DAFTAR ISI

## **KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
STANDAR LAYANAN INFORMASI	3
PPID KEMENKO MARVES	4

## **IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

PELAYANAN PUBLIK KEMENKO MARVES	6
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	8
KOORDINASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK	9
TATA CARA LAYANAN INFORMASI PUBLIK	14
PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK	15
CAPAIAN PPID KEMENKO MARVES	16

## **KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

INTERNAL	18
EKSTERNAL	18

## **PENUTUP**

KESIMPULAN	19
REKOMENDASI	19

# KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



## KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara sehingga setiap Badan Publik diwajibkan untuk melakukan pengelolaan informasi publik sebagai perwujudan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan.

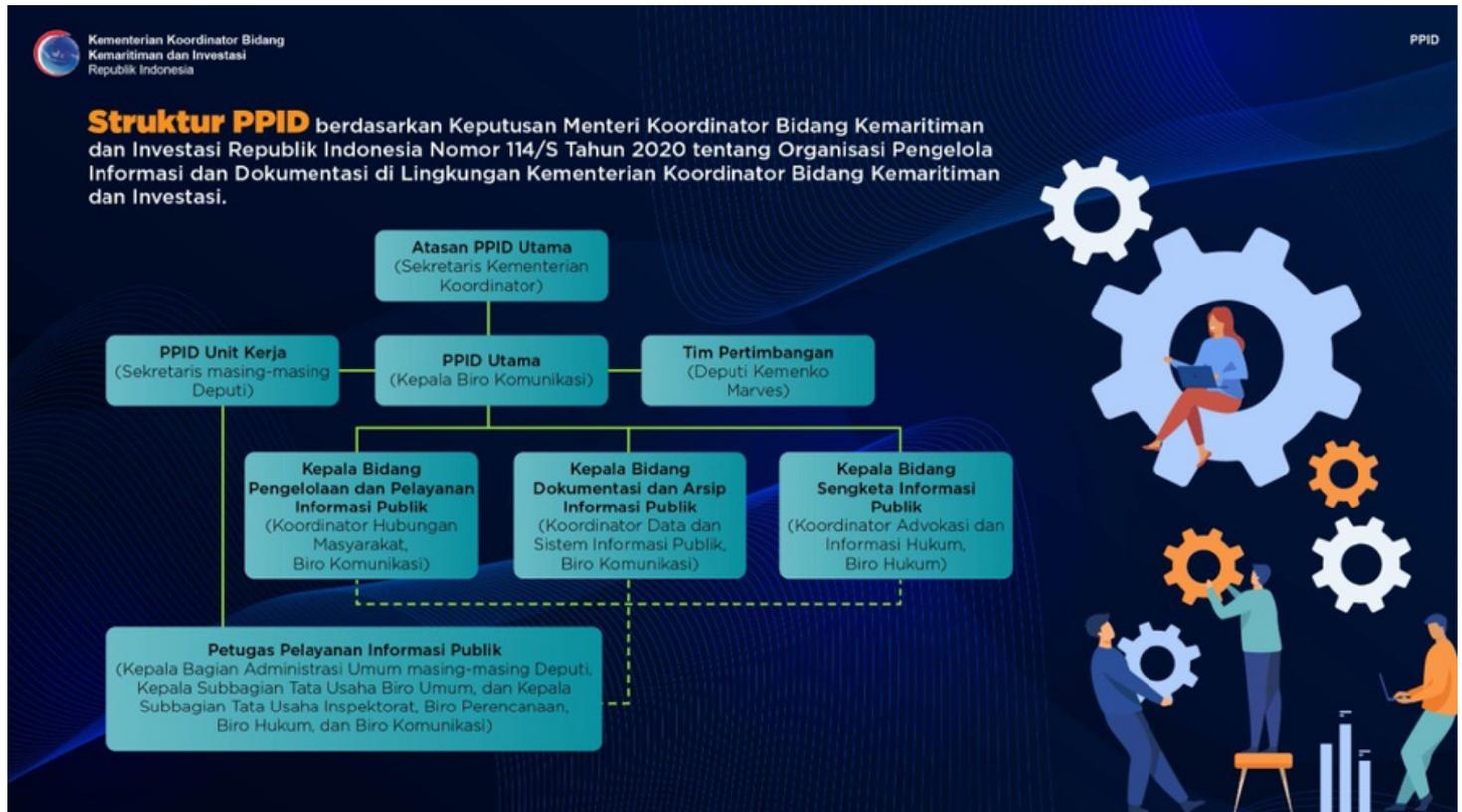
UU Keterbukaan informasi Publik menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana

pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik, Selain itu mendorong partisipasi masyarakat dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.

Dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, Setiap badan publik diwajibkan untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta mengembangkan sistem layanan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi telah membentuk PPID melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dan Investasi juncto Peraturan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Marves.

Adapun susunan Organisasi PPID ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Nomor 114/S Tahun 2020 Tentang

Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai berikut :



Dalam pemenuhan kebutuhan informasi publik, PPID Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi memiliki visi mengakselerasikan penyebaran informasi public yang berdaya guna bagi Masyarakat.

Sementara misi dari PPID Kemenko Marves adalah untuk memberikan pelayanan informasi public secara tepat dan berdaya guna bagi Masyarakat serta memanfaatkan tekonoli informasi dalam pelayanan, penyebaran dan penyediaan informasi publik.

“  
**Kemenko Marves memiliki komitmen yang tinggi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dan memberikan akses informasi kepada masyarakat**  
 ”

Menko Marves - Luhut B. Pandjaitan

**Maklumat Layanan Informasi Publik**

Dengan ini, Kami menyatakan sanggup menyelenggarakan **Pelayanan Informasi Publik** sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Apabila tidak menepati janji ini, Kami siap menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Jakarta, 15 Agustus 2020  
 PPID Utama Kemenko Marves  
 TTD  
 Andreas Dipi Patria

# STANDAR LAYANAN INFORMASI

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menyebutkan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada

masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Sebagai wujud komitmen Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam melakukan pelayanan publik sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang, disusun Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang mengatur 9 (sembilan) standar pelayanan, dimana 6 (enam) diantaranya terpusat di PPID Kemenko Marves. Standar Pelayanan yang terpusat di PPID tersebut antara lain:

**ADA YANG GRATIS DI KEMENKO MARVES**

**Kemenko Marves Memberikan 6 Pelayanan Secara GRATIS**

<b>PERMOHONAN INFORMASI</b> AJUKAN PERMOHONAN	<b>PERMOHONAN AUDIENSI</b> AJUKAN PERMOHONAN	<b>PERMOHONAN KONSULTASI</b> AJUKAN PERMOHONAN
<b>RAPAT KOORDINASI PENYELESAIAN ISU KEMARITIMAN DAN INVESTASI</b> AJUKAN PERMOHONAN	<b>ASISTENSI PENYELESAIAN ISU KEMARITIMAN DAN INVESTASI</b> AJUKAN PERMOHONAN	<b>PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK</b> PESAN

Pada tahun 2023 Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi juga telah menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada tanggal 14 Oktober 2023.

Ruang lingkup Permenko Marves Nomor 10 Tahun 2023 ini meliputi :

- Kelembagaan pengelola informasi dan Dokumentasi;
- Klasifikasi Informasi;
- Standar Layanan; dan
- Laporan dan Evaluasi

# PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN DAN INFORMASI

PPID Kemenko Marves memiliki visi untuk mengakselerasikan penyebaran informasi publik yang berdaya guna. Untuk mewujudkan visi tersebut, PPID Kemenko Marves menjabarkannya menjadi 2 misi, sebagai berikut:

- Memberikan pelayanan informasi publik secara tepat dan berdaya guna bagi masyarakat
- Memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan, penyebaran, dan penyediaan informasi publik.

Kementerian Koordinator  
Bidang Kematriman dan Investasi  
Republik Indonesia

## Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

### Tugas

Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku

### Fungsi

- Mengoordinasi pelayanan informasi publik
- Mengoordinasi pemutahiran informasi publik
- Mengoordinasi pengembangan layanan informasi publik
- Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
- Keterbukaan informasi publik pada PPID Unit Kerja

[@kemenkomarves](#) [@kemenkomarves](#) [Kemenko Bidang Kematriman dan Investasi](#) [Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi](#)



## PPID Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memberikan Pelayanan Informasi Publik

### Waktu Operasional:

Senin - Kamis : 08.00 - 15.30 WIB

Jumat : 08.00 - 15.00

Istirahat : 12.00 - 13.00

Jakarta, 15 Agustus 2020  
PPID Utama Kemenko Marves

TTD

Andreas Dipi Patria



# IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

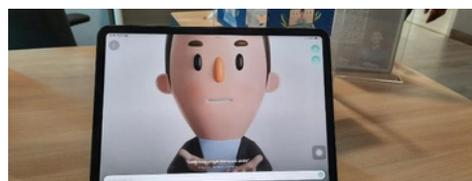
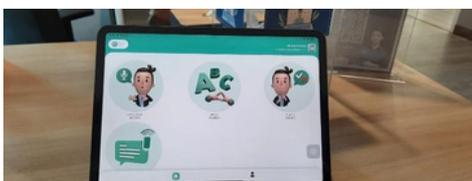
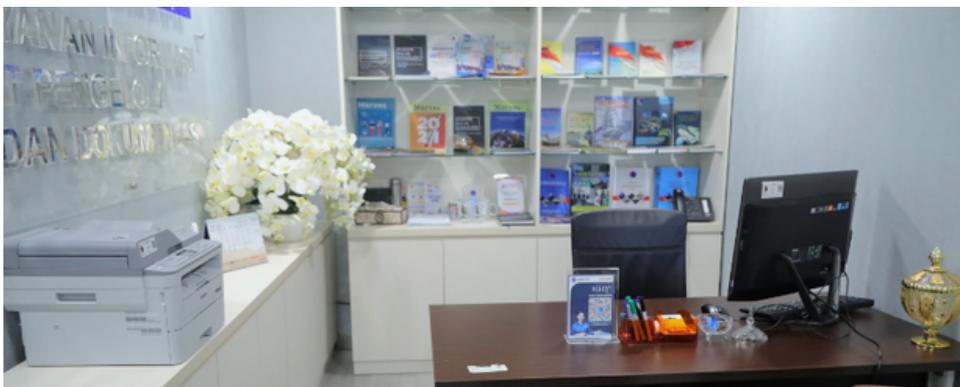


## PELAYANAN PUBLIK KEMENKO MARVES

Menyediakan Desk Khusus Layanan Informasi

Masyarakat yang ingin meminta informasi dapat mendatangi secara langsung desk pelayanan informasi, yaitu ruangan Pusat Pelayanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang terletak pada Gedung Kemenko Marves Lantai 1.

Akses menuju ruangan Pusat Pelayanan PPID Kemenko Marves ramah bagi penyandang disabilitas karena memiliki jalur masuk khusus untuk pengguna kursi roda, serta dilengkapi dengan fasilitas kursi roda dan ruang tunggu prioritas. Selain itu pemohon informasi juga akan disambut oleh Staf PPID yang bertugas.



Pada era yang serba digital, PPID Kemenko Marves juga memberikan pelayanan informasi publik melalui website <https://e-ppid.maritim.go.id/>.

Pada website tersebut, aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas tetap diperhatikan sebagai bentuk inovasi dari PPID Kemenko Marves.

Penganggaran pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor. SP DIPA-120.01/350494/2023 tanggal 30 November 2022.



Inovasi Pelayanan Publik

Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan berbagai inovasi guna mempermudah dan mempercepat pengguna layanan untuk memperoleh informasi.

Tahun ini Kemenko Marves mengembangkan integrasi layanan website PPID Kemenko Marves sehingga permohonan informasi yang masuk melalui Website PPID dapat langsung diteruskan kepada PPID unit kerja untuk ditindaklanjuti. Integrasi layanan ini memberikan manfaat dalam mempercepat proses pemberian jawaban informasi kepada pemohon serta mengurangi penggunaan kertas (paperless) karena tidak diperlukan lagi nota dinas dari PPID kepada PPID unit kerja.

Selain itu, PPID Kemenko Marves juga mengembangkan sensorik netra pada website PPID Kemenko Marves, antara lain:

- Pengaturan Warna dan Tulisan

Pemohon Informasi dapat mengatur warna dan tulisan dengan melakukan klik pada menu , yang didalamnya terdapat pilihan : Besarkan Teks, Kecilkan Teks, Garis Bawah Tautan, Warna Abu-Abu, Kontras Tinggi, Kontras Negatif, Latar Belakang Terang dan Font Mudah Dibaca.

Pengaturan warna dan tulisan ini memudahkan bagi penderita Low Vision untuk melihat informasi dan mengakses website PPID Kemenko Marves.

- Panduan Suara

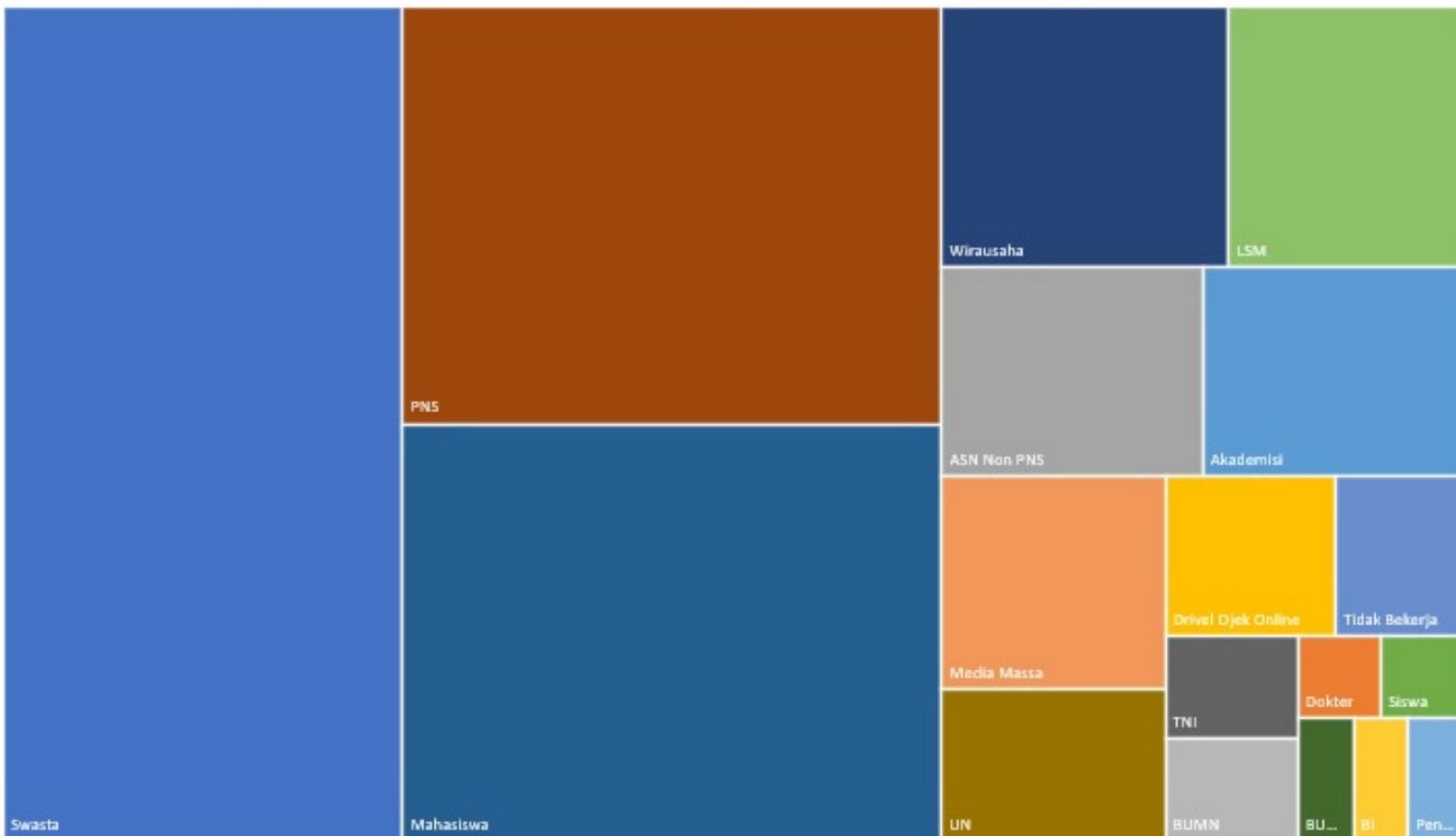
Pemohon informasi dapat mengaktifkan layanan panduan suara yang ada di website PPID Kemenko Marves. Layanan ini mempermudah penyandang tuna netra untuk mengakses menu-menu yang disediakan pada website PPID Kemenko Marves.

# PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2023, PPID Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menerima Pemohon Informasi dari Perorangan, Kelompok Orang dan Badan Hukum. Permohonan informasi yang diterima melalui datang langsung ke desk pelayanan PPID Kemenko Marves, website PPID Kemenko Marves dan Email PPID Kemenko Marves.

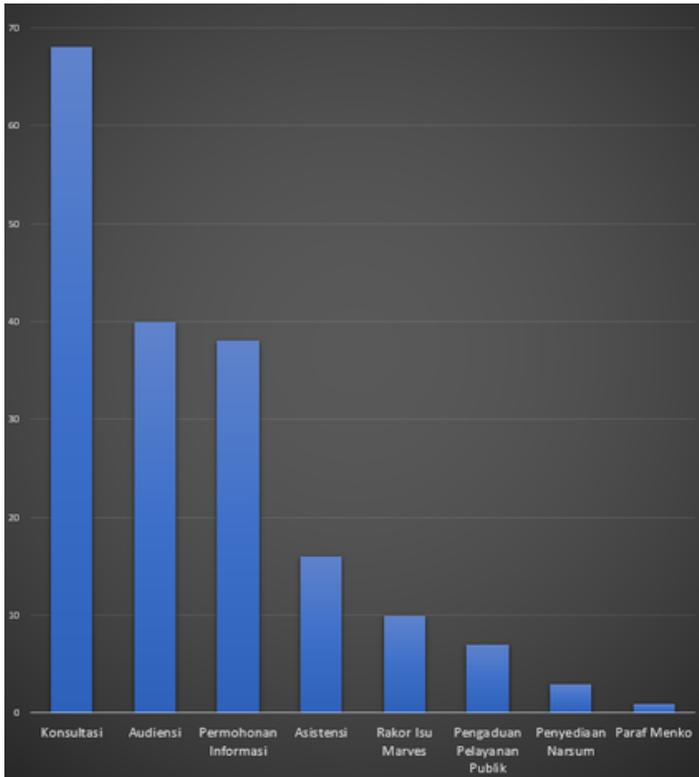


- |                 |               |               |                      |             |         |
|-----------------|---------------|---------------|----------------------|-------------|---------|
| ■ Swasta        | ■ Dokter      | ■ ASN Non PNS | ■ Drivel Ojek Online | ■ Akademisi | ■ Siswa |
| ■ Wirausaha     | ■ PNS         | ■ TNI         | ■ UN                 | ■ Mahasiswa | ■ BUMN  |
| ■ Tidak Bekerja | ■ Media Massa | ■ BUMN        | ■ BI                 | ■ Pensiun   | ■ LSM   |



Jika dilihat dari latar belakang pekerjaan pemohon informasi di Kemenko Marves, baik yang datang langsung ke desk informasi, melalui email, maupun permohonan yang terdapat dalam aplikasi PPID Kemenko Marves, didapatkan data latar belakang pekerjaan seperti diagram diatas

## PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



Kemenko Marves selalu berusaha memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengintegrasikan seluruh layanan pelayanan publik menjadi layanan satu pintu melalui PPID Kemenko Marves.

Sehingga, PPID Kemenko Marves tidak hanya melayani permohonan informasi, namun juga layanan publik lainnya seperti pada diagram batang tersebut.

## KOORDINASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2023, PPID Kemenko Marves telah melakukan sejumlah koordinasi terkait pemberian layanan informasi publik. Koordinasi tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas petugas layanan informasi, pengembangan sistem informasi layanan informasi publik, maupun penguatan kelembagaan, baik itu terkait regulasi maupun hubungan antar lembaga yang menjamin layanan prima lintas lembaga dalam lingkup koordinasi Kemenko Marves.

### Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik dan Proyeksi Kerja tahun 2023

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 dan Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) Lingkup Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi yang diadakan oleh Biro Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini diadakan secara langsung dan virtual melalui video konferensi zoom pada Rabu, 1 Februari 2023.

Acara yang dilaksanakan selama satu hari ini dibuka oleh Koordinator Hubungan Masyarakat, Khairul Hidayati dengan menyampaikan sambutan pembukaan dengan narasumber Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat (KIP) Fathul Ulum dan Aditya Nuriya Sholikhah.

## Benchmarking dan Workshop Sinergi Pengelolaan Informasi dan Pelayanan



Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan wawasan terkait pengelolaan informasi dan pelayanan publik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, serta melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi dan pelayanan publik, Biro Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengadakan Workshop Sinergi Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan pada Jumat-Minggu (03-05 Maret 2023).

“Dalam era digital seperti saat ini, PPID juga harus mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik. Dengan adanya website, aplikasi, dan media sosial yang terhubung dengan PPID, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan.

Kemenko Marves sebagai Badan Publik turut mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui PPID dan tahun ini adalah tahun ketiga Kemenko Marves mendapatkan predikat Badan Publik Informatif dari KIP. Selain itu saat ini juga dikembangkan sistem layanan informasi publik melalui PESAN yang dapat diakses pada website Kemenko Marves dan juga melakukan pengelolaan SP4N LAPOR.

Di era digital seperti sekarang, tentunya diperlukan berbagai inovasi dalam pengelolaan informasi dan pelayanan publik agar pesan yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat dapat tersampaikan dengan baik dan menyeluruh, meliputi seluruh kalangan masyarakat tanpa diskriminasi. “Oleh karena itu, pada kesempatan ini diharapkan dapat menjadi sarana masing-masing K/L dan pemerintah daerah untuk berbagi pengalaman dan bertukar pikiran dalam pengembangan pelayanan publik di instansi pemerintahan, sehingga dapat tercipta strategi efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan informasi dan pelayanan publik,” tambah Karo Andreas.

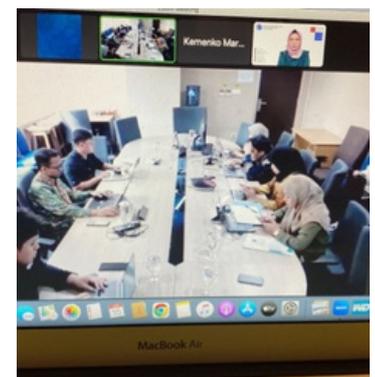
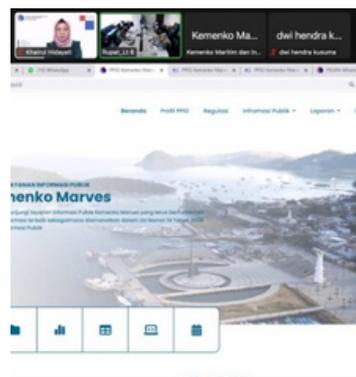
Pada kegiatan ini turut hadir berbagai narasumber perwakilan dari Komisi Informasi Pusat (KIP), Kementerian Hukum dan HAM, Bank Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Pendayagunaan Reformasi Birokrasi, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman. Kegiatan ini dihadiri pula oleh perwakilan dari tujuh kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kemenko Marves dan pemerintah daerah kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Rapat Pengintegrasian Layanan Aspirasi Masyarakat

Pada Rapat Koordinasi Integrasi Layanan Aspirasi Masyarakat yang diselenggarakan terdapat beberapa pembahasan yaitu sebagai berikut:

- Tampilan pada website PPID terdapat 2 versi, yaitu tampilan umum (interface) dan tampilan admin. Berita yang ditampilkan sudah terintegrasi dengan [maritim.go.id](http://maritim.go.id). Form aduan masyarakat diambil dari PESAN (sudah terkoneksi pada website PESAN). Pada kolom agenda kegiatan, jadwalnya bisa lebih dari satu hari pelaksanaannya, beda dengan website PPID sebelumnya hanya bisa satu hari saja
- Status terkirimnya pegaduan sudah tersedia option penolakan bukan langsung dihapus dari section pemohon. Akan ada notif email status yang masuk dengan keterangan "DIPROSES". Pada email tersebut sudah tertera juga keterangan pada subjek email dan nomer tiket pengaduan. Verifikasi pengaduan terdapat dua opsi yaitu proting deputy, untuk dapat memilih deputy mana yang menangani pengaduan tersebut, dan tangani sendiri, yang artinya PPID dapat menjawab pengaduan itu dengan mandiri
- Setiap perubahan status pengaduan, akan langsung terupdate dalam email. Terkait dengan validasi upload Kartu tanda Penduduk (KTP) sudah dapat dipastikan aman, dengan jenis file yang diizinkan JPG, PNG, JPEG, PDF. Terkait dengan informasi, deputy dapat menginput informasi, dengan jenis informasi berkala, serta merta, dan setiap saat. Mengenai migrasi ke halaman PPID, secara teknis development, dimungkinkan aplikasi yang lama sudah di-takedown dan didaftarkan ulang dengan versi yang terbaru. Karena tidak memungkinkan kalau diambil ulang. Untuk sementara waktu, tampilan aplikasi untuk versi Handphone akan disamakan dengan Website (Webview), dikarenakan development aplikasi memakan waktu yang lama.
- Terkait dengan progress dari bagian Datsi, permohonan dan pengajuan dari setiap jenis informasi keberatan, asistensi terkait file sudah dibuatkan server kita sendiri (simulasikan) terkait file yang diupload oleh pemohon sudah terpisah dengan permohonan dan sudah terkelompok sesuai dengan nomor tiketnya. Terkait dengan validasi MIME/TYPE sudah disesuaikan, jadi yang file yang masuk sudah terbatas. Aplikasi VPS 8 core, 4 Gb RAM, dan untuk SSD 50 Gb, kebutuhan lainnya nanti akan ada susulan. Terkait SMTP sepertinya akan berat jika digunakan di lingkungan Marves, karena jika dibebankan ke dalam satu email saja, agar tidak diblacklist. Terkait dengan notifikasi wa berlangganan akan menggunakan pihak ketiga, kalau dari wa resmi akan memakan harga yang cukup mahal.

## Koordinasi Teknis Integrasi Layanan Publik Kemenko Marves



## Workshop Komunikasi Efektif Kepada Penyandang Disabilitas

---

Petugas pelayanan informasi publik merupakan garda depan Kemenko Marves dalam menerima dan memberikan layanan kepada masyarakat. Untuk itu, petugas informasi harus siap dan mampu berkomunikasi dengan masyarakat dalam situasi dan kondisi apapun.

berdasarkan hal tersebut, PPID Kemenko Marves mengadakan Workshop Komunikasi Efektif Kepada Penyandang Disabilitas, khususnya kepada penyandang tuli.

Workshop tersebut dilaksanakan pada 5 April 2023 dan dibuka langsung oleh Kepala Biro Komunikasi. Peserta workshop merupakan petugas layanan informasi serta perwakilan dari PPID Unit Kerja.



## Peninjauan Hasil Integrasi Layanan Publik

---



Maksud dilaksanakannya kegiatan Rapat Review Hasil Integrasi Layanan Publik Kemenko Marves, pada tanggal 27 Juli 2023 adalah untuk mendiskusikan pengembangan layanan publik PPID Kemenko Marves. Adapun PPID ini menjadi media atau wadah penyampaian aspirasi masyarakat kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Sedangkan tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah agar perencanaan dalam mengembangkan PPID sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan publik.

## Benchmark Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kota Bandung



Dalam rangka mendukung implementasi sistem kerja untuk organisasi yang dinamis pasca kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pada tahun 2024, Kemenko Marves melalui Biro Hukum menyelenggarakan kegiatan sharing knowledge dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah menerapkan mekanisme kerja berbasis tim pasca kebijakan penyederhanaan birokrasi, Jumat (15-9-2023)



Kepala Biro Hukum Kemenko Marves, Budi Purwanto mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi tempat untuk melihat best practise dari implementasi sistem kerja karena telah menerapkan mekanisme pekerjaan yang berbasis penugasan tim dalam organisasi ataupun lintas organisasi.

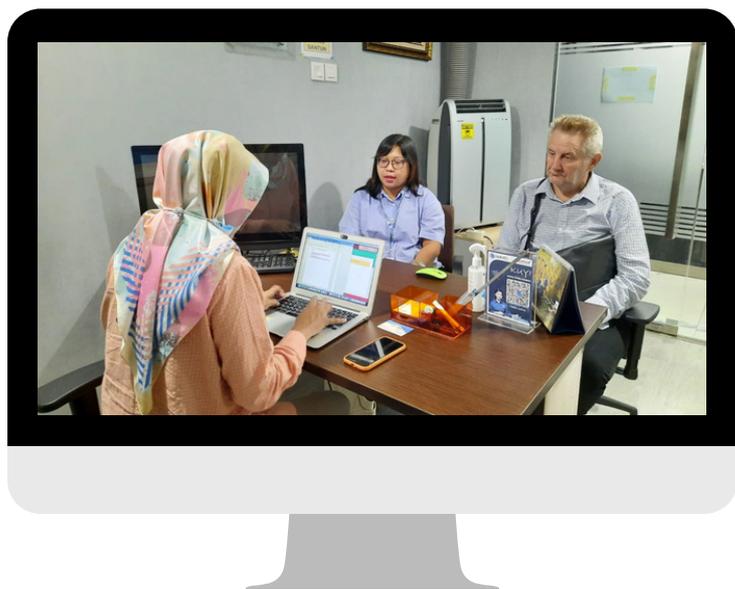
Kegiatan ini disambut baik oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah provinsi Jawa Barat, Teten Ali Mulku Engkun. Karo Teten mengatakan bahwa model sistem kerja Team of Terms merupakan sistem kerja Aparatur di Prov. Jawa Barat yang menekankan kolaborasi kinerja antar lini Instansi Pemerintah yang penugasannya dari mulai antar bidang, antar Pemerintah Daerah dan antar Instansi.

Setelah pertemuan sharing session, Tim Kemenko Marves berkesempatan mengunjungi ruang kerja Biro Organisasi yang telah menerapkan co-working space. Ruang Kerja berkonsep green office baik indoor maupun outdoor. Kesan tersebut sangat memberikan kenyamanan bagi pegawai untuk bekerja. Selain itu, tersedia juga area bermain, sport, kitchen set dan taman terbuka yang dapat mendorong banyak inovasi baru dalam sistem kerja.

Tim Kemenko Marves juga melaksanakan diskusi dan 'sharing knowledge' guna meningkatkan kualitas pelayanan publik ke DPMPTSP Kota Bandung yang telah mendapatkan predikat "A" selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2021. Koordinator Humas Khairul Hidayati yang menjadi Ketua Tim Pengelola Pelayanan Publik Kemenko Marves dalam kegiatan tersebut mengatakan bahwa saat ini tim Pengelola Pelayanan Publik Kemenko Marves sangat fokus pada peningkatan pelayanan publik berpredikat layanan prima.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan Analis Kebijakan, Pranata Humas, Arsiparis, Pranata Komputer, Perancang Peraturan Perundang-undangan dan perwakilan dari DPMPTSP Kota Bandung.

# TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



## Mekanisme Permohonan Informasi

PPID Kemenko Marves telah mengatur mekanisme layanan informasi bagi publik yang melakukan permohonan informasi. Permohonan informasi yang datang baik dari perorangan, kelompok orang, maupun badan hukum akan diterima oleh petugas pemberi layanan informasi yang bertugas di desk khusus PPID.

Permohonan tersebut perlu disampaikan secara langsung dengan datang ke front desk PPID Kemenko Marves di Lt.1,

maupun secara elektronik melalui laman website PPID Kemenko Marves dan email PPID Kemenko Marves.

Permohonan informasi baik yang datang langsung maupun secara online wajib mengisi data identitas diri ataupun Lembaga pemohon informasi disertai dengan melampirkan kartu identitas resmi, yaitu Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon yang berasal dari individu dan Surat Kuasa bagi pemohon informasi yang berasal dari kelompok orang maupun badan hukum.

Selanjutnya, pemohon informasi wajib mengisi form permohonan informasi yang telah disediakan. Berdasarkan regulasi yang ada, permohonan yang telah diajukan wajib ditindak lanjuti setidaknya dalam waktu 10 hari kerja.

## Mekanisme Pengajuan Keberatan

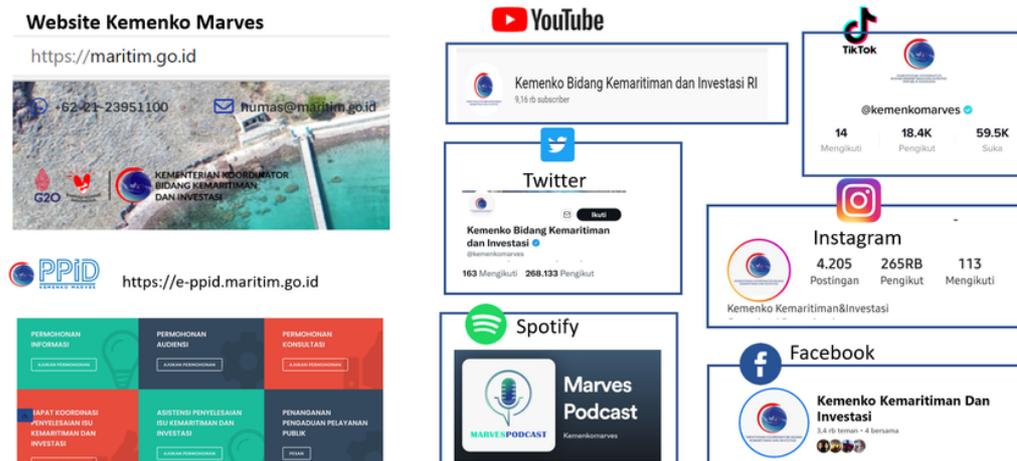


## Mekanisme Permohonan Sengketa

Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan sengketa kepada Komisi Informasi Pusat (KIP) Jika atasan PPID tidak memberikan tanggapan atau tidak menindaklanjuti pengajuan keberatan, maka pemohon dapat mengajukan sengketa ke Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 hari kerja.

Pemohon dapat mengajukan permohonan sengketa kepada PPID Kemenko Marves ke Komisi Informasi dengan menyertakan identitas pemohon perorangan/kelompok orang/badan hukum, permohonan informasi dan tanda terima dari PPID Kemenko Marves, jawaban permohonan informasi dan tanda terimanya, pengajuan keberatan dan tanda terimanya, tanggapan keberatan oleh Atasan PPID Kemenko Marves dan tanda terimanya, kemudian pemohon perlu mengisi formulir permohonan sengketa dari Komisi Informasi.

## PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK



Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melakukan penyebaran informasi publik melalui website dan sosial media resmi diantaranya youtube, twitter, facebook, Instagram, tiktok dan spotify. Selain itu Kemenko Marves juga memiliki media elektronik berupa videotron dan e-magazine.

Penyebaran informasi yang dilakukan melalui media sosial berupa video, poster maupun dalam bentuk infografis untuk memberikan informasi yang lebih rinci dan jelas.



# CAPAIAN PPID KEMENKO MARVES



Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi kembali memperoleh predikat Badan Publik Informatif di Tahun 2023 yang dipertahankan oleh Kemenko Marves selama 4 (empat) tahun berturut-turut sejak tahun 2020.

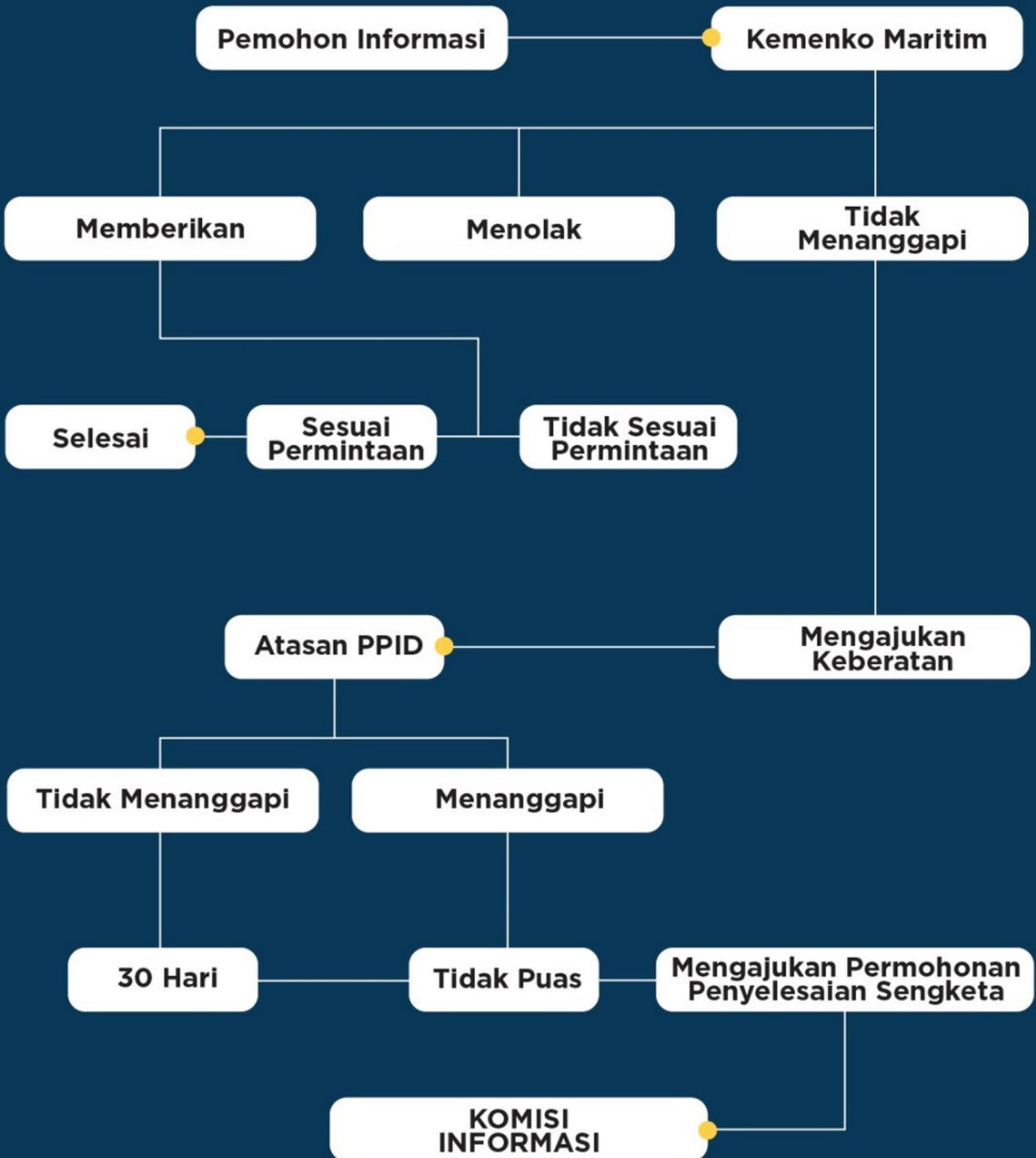
Anugerah tersebut berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2023.

Kemenko Marves mendapatkan Badan Publik kategori Kementerian Informatif dengan nilai 93,33.

Capaian ini juga menjadi wujud komitmen dan keseriusan Kemenko Marves sebagai badan publik dalam menciptakan Keterbukaan Informasi Publik.

Kemenko Marves melalui PPID akan terus berupaya untuk berinovasi dalam memberikan layanan keterbukaan informasi publik yang mudah, cepat, dan berkualitas.

# Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi



# KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK



## INTERNAL

---

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Utama, antara lain:

- Kendala dalam ketersediaan sarana dan prasarana layanan informasi publik di Kemenko Marves, dalam hal ini meliputi keterbatasan ruang pusat pelayanan publik sehingga tidak bisa menampung pemohon informasi yang datang berkelompok.
- Adanya pergantian operator/petugas pada unit kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sehingga diperlukan upaya yang berkesinambungan untuk mendampingi operator/petugas PPID yang baru
- Koordinasi lintas unit dalam menyediakan informasi publik belum seluruhnya memberikan kontribusi yang maksimal, sehingga data dan informasi publik yang dihasilkan belum bisa dengan mudah diakses oleh operator/petugas PPID.

## EKSTERNAL

---

Selain kendala internal yang dialami oleh PPID Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi terdapat pula kendala eksternal antara lain:

- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur ataupun kelengkapan yang dibutuhkan dalam mengajukan permohonan informasi publik sehingga menyebabkan keterlambatan dalam proses layanan informasi publik

# PENUTUP



## KESIMPULAN

PPID Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terus berupaya meningkatkan layanan informasi publik, maka pada tahun selanjutnya PPID akan meningkatkan pelayanan informasi berbasis elektronik serta tata kelola penyediaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

Pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik tahun 2023, PPID Pusat Kemenko Marves telah meningkatkan koordinasi dengan PPID Unit Kerja di Kemenko Marves. Sehingga pengumpulan daftar informasi publik dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

PPID Kemenko Marves terus berusaha untuk memenuhi hak publik untuk mendapatkan informasi secara terbuka dan transparan. Salah satu Langkah yang telah diambil dan dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya adalah dengan menyiarkan informasi publik berkala pada media massa maupun website dan media sosial resmi Kemenko Marves

## REKOMENDASI

Sebagaimana dijelaskan pada bagian kendala, maka dalam memberikan pelayanan informasi publik Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi memerlukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, serta meningkatkan koordinasi lintas unit dalam memberikan informasi publik.

Dengan adanya upaya peningkatan kapasitas dan koordinasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan informasi publik yang diberikan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada masyarakat.